

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di masa sekarang ini pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual manusia seutuhnya lahir maupun batin.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dewasa ini berkembang pengaruh pemakaian obat-obatan di kalangan masyarakat. Hal ini sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin lama semakin berkembang dengan pesat, dan salah satu yang paling marak saat ini adalah masalah narkoba dan psikotropika.

Masalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkoba semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.¹ Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkoba) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaanya tanpa resep dokter.

Peredaran narkoba dan psikotropika secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya akan semakin

¹ Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hal. 30.

mengkhawatirkan, apalagi kita mengetahui yang banyak menggunakan narkoba dan psikotropika adalah kalangan generasi muda (generasi penerus bangsa) yang merupakan harapan dan tumpuan bangsa di masa yang akan datang.

Aparat penegak hukum acapkali mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika ini. Di satu sisi, masalah peredaran dan penyalahgunaan ini merupakan perbuatan terlarang dan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya. Di sisi lain, masih kurangnya aturan yang memadai untuk menjaring para pelaku (baik pengedar maupun pengguna) dan diharapkan dengan dikeluarkannya aturan baru yaitu Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, masalah penggunaan Narkoba yang dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa ini dapat diberantas.

Salah satu upaya dalam membantu mengungkap berbagai kejahatan termasuk di dalamnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika adalah dibentuknya Laboratorium Forensik. Laboratorium Forensik merupakan suatu lembaga yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha pelayanan serta membantu mengenai kegiatan pembuktian perkara pidana dengan memakai teknologi dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan laboratorium forensik.²

Pengetahuan yang sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan tugas polisi sebagai penyidik adalah ilmu kedokteran kehakiman. Pelaksanaan tugas Laboratorium Forensik meliputi

² <http://www.labfor.POLRI.go.id/>, Diakses Tanggal 23 Juni 2013.

bantuan pemeriksaan teknis laboratories baik terhadap barang bukti maupun terhadap tempat kejadian perkara, serta kegiatan-kegiatan bantuan yang lain terhadap unsur-unsur operasional kepolisian.³

Maka dari itu peranan Laboratorium Forensik sangat penting untuk membuktikan dan mengungkapkan bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, begitu pentingnya peranan Laboratorium Forensik dalam pemeriksaan barang bukti menunjukkan bahwa tidak semua tindak kejahatan itu dapat diungkap dari adanya saksi hidup saja, melainkan juga dengan adanya barang bukti.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Peranan Laboratorium Forensik POLRI Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang)”.

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian dapat berjalan secara terarah dalam hubungannya dengan pembahasan permasalahan, maka diperlukan pembatasan masalah yang diteliti. Pembatasan ini setidaknya untuk memberikan gambaran kemana arah penelitian dan memudahkan penelitian dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

³ *Ibid.*

1. Peranan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui peranan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk melatih diri melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

- b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana terutama berkaitan dengan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan data dan informasi mengenai proses penyidikan yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya dalam hal penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

F. Kerangka Pemikiran

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di samping berpengaruh pada tingkat kehidupan juga dapat menimbulkan dampak negatif dengan munculnya kejahatan yang memanfaatkan kemajuan iptek tersebut. Untuk dapat mengatasi segala tindak kejahatan mulai dari yang tradisional hingga yang memanfaatkan kemajuan iptek haruslah diterapkan *Scientific Crime Investigation (SCI)*. SCI adalah adalah Penyelidikan / Penyidikan kejahatan secara ilmiah yang didukung oleh berbagai disiplin ilmu baik ilmu murni maupun terapan hingga dikenal sebagai Ilmu Forensik.⁴

Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) sebagai unsur Pelaksana Teknis di bawah Bareskrim POLRI, menerapkan ilmu forensik untuk mendukung tugas-

⁴ <http://www.labfor.POLRI.go.id>, *Sejarah Laboratorium Forensik*, Diakses Tanggal 19 Oktober 2013, Pukul 16.45 WIB.

tugas Reserse Kriminal POLRI dalam mengungkap tindak pidana kejahatan dengan melaksanakan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan atau Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti (BB) secara ilmiah dan komprehensif.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa salah satu tugas kepolisian adalah melakukan penyidikan. Penyidikan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan, penyidik diberi kewenangan seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHP yang menyatakan bahwa mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan Pasal 120 ayat (1) KUHP menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Pengertian mendatangkan para ahli / memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik POLRI, sehingga Laboratorium Forensik POLRI dapat berperan dalam tiap tahapan proses penegakan hukum sebagai berikut:⁵

⁵ Andayono, 2011, *Peran Puslabfor Bareskrim POLRI Dalam Rangka Scientific Crime Investigation*, Makalah Disampaikan pada Workhop Pengolahan TKP, di hotel Borobudur 21 Desember 2011, Hal. 7.

1. Tahap penyelidikan

Pada proses penyelidikan, penyidik mempunyai wewenang untuk mencari keterangan dan barang bukti. Selain itu, penyidik bersama-sama penyidik yang telah menerima laporan segera datang ke TKP dan melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai untuk menjaga status quo. Dalam rangka penanganan TKP ini, penyidik maupun penyidik berusaha mencari barang bukti yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium.

Proses penyidikan tindak pidana narkoba perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik untuk mengenali, mencari, mengambil dan mengumpulkan barang bukti tersebut diperlukan ketelitian, kecermatan dan pengetahuan atau keahlian mengenai bahan atau barang bukti tersebut, oleh karena itu, tahap ini perlu melibatkan Laboratorium Forensik. Sebagai contoh kasus narkoba, pemalsuan produk industri, kebakaran, pembunuhan, peledakan, pencemaran lingkungan hidup / limbah dimana barang buktinya sering bersifat mikro yang keberhasilan penemuan dan pemeriksaan sangat tergantung terhadap teknologi yang dipergunakan. Dari hasil pemeriksaan laboratorium tersebut nantinya dapat dijadikan petunjuk dalam proses penyelidikan / penyidikan lebih lanjut.

2. Tahap penindakan

Salah satu kegiatan penindakan adalah melakukan penyitaan terhadap barang atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Dalam hal melakukan penyitaan terhadap benda atau barang

yang berbahaya atau mudah terkontaminasi, cara pengambilannya memerlukan peralatan atau penanganan khusus, maka diperlukan dukungan teknis dari Laboratorium Forensik untuk menangani barang bukti tersebut. Sebagai contoh kasus pencemaran lingkungan, keracunan, kebakaran dan sebagainya. Dengan demikian, diharapkan bahwa barang bukti yang kemudian hari akan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium tidak mengalami perubahan atau terkontaminasi, sehingga hasil pemeriksaan yang dilakukan akan sesuai dengan sifat asli barang bukti tersebut. Peran Laboratorium Forensik pada tahap penindakan sangat diperlukan yaitu pada pengambilan barang bukti atau sampling serta pengamanan atau pengawetan barang bukti yang akan diperiksa di laboratorium.

3. Tahap pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikkan tersangka dan atau saksi atau barang bukti, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas. Salah satu kegiatan pada tahap pemeriksaan yang berhubungan dengan Laboratorium Forensik antara lain bahwa penyidik dapat meminta pendapat orang Ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Sepanjang pendapat orang Ahli yang diminta penyidik tersebut berhubungan dengan barang bukti, maka Ahli tersebut akan melakukan pemeriksaan atau analisa barang bukti di laboratorium.

Sebagai contoh pemeriksaan kandungan zat aktif dalam narkoba, pemeriksaan racun dalam organ tubuh, pemeriksaan keaslian tulisan tangan,

sidik jari pada senjata api dan sebagainya. Dimana hal-hal tersebut memerlukan pemanfaatan teknologi yang dimiliki oleh Laboratorium Forensik.

4. Tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penyidikan. Dimana dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Susunan berkas perkara, antara lain Berita Acara Pemeriksaan Ahli mengenai barang bukti. Dengan demikian, maka peran Laboratorium Forensik pada tahap ini adalah melakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan menyerahkannya kepada penyidik.

5. Tahap penuntutan

Peran Laboratorium Forensik POLRI dalam hal proses penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan konsultasi dengan pemeriksa Ahli dari Laboratorium Forensik tentang hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, sehingga unsur pidana yang didakwakan kepada tersangka menjadi lebih akurat. Selain itu, dalam hal Jaksa melakukan penyidikan kasus tindak pidana khusus, maka jaksa sebagai penyidik dapat mengirimkan barang bukti untuk diperiksa oleh Ahli di Laboratorium Forensik.

6. Tahap peradilan

Peran Laboratorium Forensik POLRI dalam tahap Peradilan, menurut KUHP Pasal 184 ayat (1), ada 5 (lima) alat bukti yang sah, yaitu :

1) Keterangan Saksi, 2) Keterangan Ahli, 3) Surat, 4) Petunjuk, 5) Keterangan Terdakwa.

Dari ke-5 (lima) alat bukti tersebut di atas, minimal 3 (tiga) diantaranya dapat diemban oleh laboratorium forensik POLRI yaitu keterangan ahli, surat dan petunjuk berdasarkan hasil pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris barang bukti dalam bentuk produk pemeriksaan laboratorium forensik POLRI.

G. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan, maka untuk itu dibutuhkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, yakni:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis (empiris)⁶ yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta dalam praktik hukum di masyarakat, khususnya di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang mengenai peranan laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 72-79

2. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang peranan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari literatur kepustakaan. Berdasarkan bahan-bahan hukum yang berkaitan mengikatnya dengan permasalahan penelitian dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat mengikat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang meliputi buku-buku ilmiah yang menyangkut tentang hukum, buku-buku acuan, dokumen, hasil penelitian, dan lain-lain.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam kamus-kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data pada penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh data sekunder, maka penulis mengumpulkan bahan dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.⁷

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Demi tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang, dengan cara :

1) Wawancara

Agar data yang diperoleh lebih konkrit, maka penulis melakukan teknik wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subjek penelitian (pihak-pihak) sesuai

⁷ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hal. 21.

dengan masalah yang penulis angkat⁸, yaitu Petugas Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang.

2) Observasi (Pengamatan)

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Dalam hal ini observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai cara kerja Petugas Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dalam memeriksa alat bukti narkitoka.

4. Teknik Analisis Data

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan data primer dengan teknik *editing*, yaitu meneliti, menyesuaikan atau mencocokkan data yang telah didapat, serta merapikan data tersebut. Disamping itu penulis juga menggunakan teknik *coding*, yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolong-golongkannya ke dalam kategori-kategori tertentu yang telah ditetapkan, sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan penulis menggunakan dalam penulisan tinjauan pustaka.

Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu penulis melakukan analisis kualitatif terhadap data yang terkumpul, kemudian disusun secara diskriptif dalam bentuk laporan.

⁸ Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95

H. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagaimana dalam paparan di bawah ini.

Dalam Bab I Pendahuluan, yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Dalam Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisikan uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi Tinjauan Umum tentang Penyidikan dan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Pidana, Tinjauan Umum tentang Penyidikan, tindak pidana Narkoba

Dalam Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang tugas dan kedudukan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang, peranan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, serta kendala-kendala yang dihadapi Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Dalam Bab IV Penutup, penulis uraikan kesimpulan dan saran dari uraian skripsi pada bab-bab terdahulu.